

**BAB III**  
**KONDISI KOTA BOGOR PADA MASA PENDUDUKAN JEPANG**  
**TAHUN 1942-1945**

**3.1 Bidang Politik**

Pada Agustus 1942 pemerintah militer Jepang mulai meningkatkan usahanya dalam memimpin/menguasai Bogor. Pemerintah militer Jepang mengeluarkan *Osamu Seirei* No. 27 dan No. 28 yang berisi tentang aturan pemerintahan daerah dan aturan pemerintahan *Shu* dan *Tokubetsu Shi*. Hal ini dilakukan oleh pemerintah militer dengan tujuan untuk mereorganisasi sistem pemerintahan di daerah-daerah kekuasaannya, salah satunya di Bogor. Dalam melaksanakan reorganisasinya pemerintah Jepang mulai mempekerjakan tenaga ahli pemerintahan sipil Jepang yang sudah didatangkan. Mereka mulai dipekerjakan pada badan-badan pemerintahan guna melaksanakan dan mewujudkan tujuan reorganisasi Jepang yang ingin menjadikan daerah-daerah di pulau Jawa sebagai sumber bekal dalam menghadapi perang di wilayah selatan.<sup>36</sup>

*Osamu Seirei* (Undang-undang) No. 27 mengatur tentang tata pemerintah daerah, yaitu untuk seluruh Pulau Jawa, kecuali kedua *Kochi* Surakarta dan Yogyakarta yang memiliki kedudukan istimewa yang membuat berbeda dari daerah lainnya. Tata pemerintahan daerah berdasarkan *Osamu Seirei* No. 27 dibagi atas *Shu*, *Shi*, *ken*, *Gun*, *Son*, dan *Ku*. Daerah *Shu* sama dengan keresidenan dahulu yang terbagi atas *Shi* dan *Ken*.<sup>37</sup> Berdasarkan kedua aturan di atas juga diatur bahwa *Shu* menjadi daerah pemerintahan tertinggi. Di Jawa terbagi atas 17 *Shu* yang salah

---

<sup>36</sup> Poesponegoro. M. D. & Notosusanto N., *Op.cit*, hlm 19

<sup>37</sup> *Ibid*

satunya adalah Bogor *Shu*.<sup>38</sup> Daerah *Shu* memiliki luas sama dengan keresidenan dahulu, akan tetapi dalam fungsi dan kekuasaannya berbeda. Pada masa keresidenan residensi merupakan daerah pembantu gubernur (residen). Sementara itu, *Shu* merupakan pemerintahan tertinggi dan berotonom yang berada dibawah pimpinan *Shucokan*.<sup>39</sup> Dalam menjalankan pemerintahan *Shucokan* dibantu oleh *Chokan Kanbo* (Majelis Permusyawaratan *Chokan*) yang terbagi menjadi 3 bagian, yaitu *Naisebu* (bagian pemerintahan dalam negeri), *Keizabu* (bagian ekonomi), dan *Keisatsubu* (bagian kepolisian).

Pada September 1942 dilaksanakan pelantikan para *Shucokan* oleh *Gunseikan*. Kegiatan ini merupakan awal reorganisasi sistem pemerintahan daerah dan juga para pegawainya. Dalam acara pelantikan tersebut yang menjadi *Shucokan* Bogor adalah Kolonel Sonoyama yang didampingi oleh dokter Rd. Ngabehi Soebroto sebagai *Shicho* (Walikota) dan Rd. Adipati Arja Surtajanagara sebagai *Kencho* (Bupati). Kepemimpinan Kolonel Sonoyama sebagai *Shucokan* tidak bertahan lama, karena pada 13 November 1942 Kolonel Sonoyama meninggal dunia. Kemudian untuk mengisi kekosongan kepemimpinan di Bogor, maka diangkatlah Tamate Koichi oleh *Gunseikanbu* untuk menjadi *Shucokan* Bogor. Akan tetapi masa kepemimpinan Tamate juga tidak bertahan lama, karena pada 10 Maret 1943 dikeluarkan ketetapan baru dari *Gunseikanbu* tentang perpindahan *Shucokan* di 7

---

<sup>38</sup> Daerah 17 *Shu* yaitu Banten, Batavia (Jakarta), Buitenzorg (Bogor), Preanger (Priangan), Cheribon (Cirebon), Pekalongan, Semarang, Banyumas, Pati, Kedu, Surabaya, Bojonegoro, Madiun, Kediri, Malang, Basuki, dan Madura. Zuhdi. S, *Op.cit*, hlm 34

<sup>39</sup> *Ibid*

*Shu* yang ada di Jawa. Dengan adanya ketetapan baru dari *Gunseikanbu* maka diangkatlah Sawakimoto sebagai *Shucokan* Bogor.

### 3.1.1 Dewan Pertimbangan Daerah Bogor (*Shu Sangi-kai*)

Perang pasifik yang semakin lama membuat tentara Jepang melemah mengubah sikap Jepang terhadap negeri-negeri yang didudukinya.<sup>40</sup> Pemerintah Jepang di Indonesia memberikan kesempatan kepada rakyat setempat untuk ikut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Hal ini dilakukan oleh pemerintah Jepang agar rakyat Indonesia dapat memberikan dukungan kepada mereka dalam menghadapi perang pasifik.

Diperkenankannya rakyat Indonesia untuk berpartisipasi dalam politik pemerintahan Jepang, maka pemerintah Jepang mengambil tindakan untuk menyikapi hal tersebut, yaitu dengan membentuk *Chuo Sangi-in* (Dewan Pertimbangan Pusat) di Jakarta dan *Shu Sangi-kai* (Dewan Pertimbangan Daerah) di 17 keresidenan, serta mengangkat penasehat (*Sanyo*) untuk departemen-departemen pemerintahan militer Jepang.<sup>41</sup> Hal tersebut tercantum dalam *Osamu Seirei* No. 36 dan 37 tentang pembentukan *Chuo Sang-in* dan *Shu Sangi-kai* yang dikeluarkan pada 5 September 1943. Adapun isi dari *Osamu Seirei* No. 37 yang mengatur tentang pembentukan Dewan Pertimbangan Daerah (*Shu Sangi-kai*), pasal 1 yang membahas tentang pemerintah Baletentara Jepang yang meminta usulan agar pemerintah daerah berjalan lancar yang kemudian di bentuk Dewan

---

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm 37

<sup>41</sup> Herkusumo, D. A. (1984). *CHUO SANGI-IN Dewan Pertimbangan Pusat pada masa Pendudukan Jepang*. Jakarta: PT Rosda Jayaputra, hlm 29.

Pertimbangan Daerah (*Shu Sangi-kai*). Sedangkan pasal 2 berisi tentang aturan pemilihan anggota-anggota *Shu Sangi-kai*.

*Shu Sangi-kai* dibentuk oleh pemerintah Jepang untuk dijadikan sebagai alat dalam memperoleh dukungan rakyat setempat. Kemudian untuk memperlancar niatnya, mereka juga menempatkan para tokoh-tokoh yang berpengaruh di masyarakat dalam kursi badan *Shu Sangi-kai*. Di Bogor *Shu* ada tiga nama yang dimanfaatkan oleh pemerintah Jepang yaitu: dr. Marzuki Mahdi, R. Gatot Mangkupraja dan K.H. Ahmad Sanusi.<sup>42</sup>

Untuk memperoleh dukungan masyarakat Bogor yang memiliki hasil bumi melimpah bagi kepentingan Jepang dalam perang Asia Timur Raya, maka diadakan sidang *Chuo Sangi-in* pertama dengan topik pembahasan untuk memperkuat tenaga perang baik itu tenaga manusia ataupun benda. Kemudian dalam sidang ini dibentuk 4 *Bunkakai* (Panitia kecil) untuk merundingkan beberapa hal. *Bunkakai* I membahas tentang memperkuat dan melindungi prajurit PETA, *Bunkakai* II membahas pengerahan tenaga pekerja guna keperluan perang dan masyarakat, *Bunkakai* III membahas perihal penghidupan masyarakat dalam masa perang dan *Bukakai* IV membahas tentang memperbanyak hasil bumi.<sup>43</sup> Hari keempat sidang 4 *Bunkakai* melaporkan hasil rundingannya masing-masing yang kemudian didapatkan kesimpulan yaitu : 1. Memperkuat dan melindungi para prajurit Peta dan *Heiho*, 2. Menggerakkan tenaga kerja untuk keperluan masyarakat dan perang, 3. Meneguhkan

---

<sup>42</sup> Zuhdi. S, *Op.cit*, hlm 86

<sup>43</sup> Herkusumo D.A. *Op.cit*, hlm 50-51

susunan penghidupan masyarakat dalam masa perang, 4. Memperbanyak hasil bumi.

Pada 12 Maret 1944 para anggota *Chuo Sangi-in* mendapat undangan dari pemerintah Bogor untuk berkunjung ke perkebunan percobaan. Dalam kunjungan tersebut Dr. Hakaide sebagai Kepala Dinas Perkebunan di Bogor menerangkan pada para anggota *Chuo Sangi-in* perihal berbagai percobaan yang telah dilakukan untuk menambah persediaan bahan makanan dan bahan untuk pakaian rakyat <sup>44</sup>

Pada sidang *Chuo Sangi-in* yang ke-4 dengan topik pembahasan tentang meningkatkan tenaga kerja dan memperbanyak hasil produksi. Dari hasil sidang ke-4 muncul beberapa keputusan, yaitu 1. Para tenaga dipaksa bekerja dengan berdasarkan “bakti tanah air”. 2. Menempatkan tenaga kerja sesuai dengan tempatnya dan 3. Perlindungan terhadap tenaga kerja. Berdasarkan hasil sidang tersebut, maka pada 27 Agustus 1944 Bogor *Shu Sangi-kai* mengadakan rapat umum. Dalam rapat ini dr. Marzuki Mahdi selaku ketua Bogor *Shu Sangi-kai* menyampaikan bahwa nasib kita ditentukan oleh hasil perang Asia Timur Raya, maka dari itu ia meminta kepada para laki-laki dan perempuan baik yang tua maupun muda untuk bekerja di pabrik-pabrik, ladang dan kantor, serta para murid sekolah harus bersiap mencangkul. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan kemenangan di perang Asia Timur Raya.

Pada 5 September diadakan rapat di Bogor, rapat ini diadakan guna mengikutsertakan penduduk dalam mengobarkan semangat perang bersama Jepang. Dalam rapat ini Bogor *Shucokan* mengatakan tentang kekejaman bangsa

---

<sup>44</sup> Zuhdi S., *Loc.it*

barat terhadap bangsa Asia, ia juga menjelaskan bahwa berdasarkan keputusan sidang *Chuo Sangi-in* ke 4 para penduduk Bogor harus ikut serta berjuang mati-matian dalam mendukung pemerintah Jepang.

### **3.1.2 Poetera (Poesat Tenaga Rakjat)**

Poetera berdiri pada 1 Maret 1943 yang diumumkan oleh Ir. Soekarno. Tujuan Soekarno mendirikan Poetera adalah untuk membangun dan menghidupkan segala apa yang telah dirobokkan oleh imperialisme Belanda.<sup>45</sup> Sedangkan bagi Jepang didirikannya organisasi ini ialah untuk mendapatkan bantuan dan dukungan masyarakat dalam perang dengan memunculkan potensi-potensi masyarakat Indonesia. Maka dari itu pemerintah Jepang memanfaatkan organisasi tersebut sebagai alat propaganda kepada masyarakat dengan memberikan tugas kepada organisasi Poetera, beberapa tugas penting yang dilakukan adalah Poetera harus memimpin masyarakat agar memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam menghapus pengaruh Amerika, Inggris, dan Belanda, bergabung dalam mempertahankan Asia Raya, memperkuat rasa persaudaraan Jepang-Indonesia, serta mengadakan kelas intensif bahasa Jepang.

Pada 9 Maret 1943 diadakan rapat besar di Lapangan Ikada dalam rangka berdirinya Poetera. Dalam upacara ini dihadiri oleh semua kalangan masyarakat.<sup>46</sup> semuanya berbondong-bondong menuju lapangan Ikada guna menyaksikan lahirnya Poetera. Para panitia Poetera Bogor dalam menghadiri rapat besar tersebut

---

<sup>45</sup> Poesponegoro. M. D. & Notosusanto N., *Op.cit*, hlm 33

<sup>46</sup> Asia Raya, 8 Maret 1943

melakukan gerak jalan dari Bogor sampai Jakarta yang dilaksanakan pada 8 Maret 1943.<sup>47</sup>

Poetera mulai dikembangkan pada April 1943, hal tersebut diawali dengan banyaknya organisasi-organisasi yang menyatakan untuk bergabung dengan Poetera, yaitu: organisasi Pengurus Besar Persatuan Guru Indonesia yang anggotanya berjumlah 15.000 orang, Perkumpulan Pegawai Pos Menengah, Pegawai Pos, Telegraf, Telepon dan Radio (PTTR) Bandung, Pengurus Besar Istri Indonesia, Ikatan Sport Indonesia dan Badan Perantaraan Pelajar-pelajar Indonesia (Baperpi).<sup>48</sup>

Akan tetapi, Poetera untuk tingkat *Shu* dan daerah salah satunya di Bogor kurang mengalami perkembangan. Hal ini disebabkan karena keadaan sosial-ekonomi yang kurang memadai, karena walau Poetera ini merupakan organisasi resmi dari pemerintahan tetapi mereka tidak mendapatkan bantuan anggaran dalam menjalankan organisasi tersebut.

Meskipun banyak kekurangan Poetera ini berhasil mempersiapkan mental rakyat untuk menuju kemerdekaan. Terutama bagi Ir. Soekarno dengan kepandaiannya dalam berpidato, ia dapat dengan luas sampai ke desa-desa dalam menyampaikan pesan-pesannya kepada rakyat melalui rapat-rapat besar dan siaran radio.<sup>49</sup> Kemudian Poetera ini dibubarkan oleh pemerintah Jepang, karena Jepang merasa bahwa organisasi ini lebih menguntungkan pihak Indonesia dalam

---

<sup>47</sup> Zuhdi. S, *Op.cit*, hlm 48

<sup>48</sup> Poesponegoro. M. D. & Notosusanto N., *Op.cit*, hlm 34

<sup>49</sup> Wahyan. A., & Burhan M.. (n.d.). *Sejarah Perjuangan di Kabupaten DT II Bogor (1942-1945)*. Bogor: 02/HUMAS.

mengarahkan rakyat untuk kemerdekaan di banding membantu usaha perang Jepang di Asia Timur Raya.

### 3.1.3 Bogor *Shu Hokokai*

Pada tahun 1944 muncul organisasi *Jawa Hokokai* yang didirikan oleh Letnan Jenderal Kumakichi Harada. *Jawa Hokokai* didirikan dengan alasan semakin hebatnya perang yang terjadi, maka dari itu pemerintah Jepang ingin lebih menyatukan lagi segenap rakyat Jawa secara lahir dan batin. Hal ini dilakukan agar mendapatkan lebih banyak dukungan dari para rakyat Jawa guna memenangkan perang di Asia. *Jawa Hokokai* memiliki 3 dasar, yaitu: mengorbankan diri, memperkuat persaudaraan dan melaksanakan sesuatu dengan bukti.<sup>50</sup>

*Jawa Hokokai* merupakan organisasi resmi dari pemerintah Jepang. Organisasi ini dipimpin langsung oleh seorang *Gunseikan*, kemudian Adapun yang di daerah dipimpin oleh *Shucokan*. Pada 7 Maret 1944 Bogor *Shu Konketsu Ikai* (Panitia Perkumpulan Kaum Peranakan) yang dipimpin oleh van Lith mengadakan sebuah rapat besar di *Dai Toa Kaikan*. Rapat ini diadakan guna membahas aktivitas organisasi *Jawa Hokokai* di Bogor. Dalam rapat ini Bogor *Shucokan* mengatakan bahwa para kaum peranakan dan bangsa Asia lainnya untuk menyumbangkan tenaga mereka dalam perang Asia Timur Raya. Kemudian van Lith selaku ketua dari Bogor *Shu Konketsu Ikai* membalas pernyataan tersebut dengan bersumpah bahwa kaum peranakan akan membantu dan menyumbangkan tenaga mereka untuk membantu Jepang dalam perang Asia Timur Raya.

---

<sup>50</sup> Poesponegoro. M. D. & Notosusanto N., *Op.cit*, hlm 35

*Jawa Hokokai* merupakan organisasi resmi dari pemerintah Jepang yang dipimpin langsung oleh *Gunseikan*. Akan tetapi para pemimpin Nasional masih dapat memanfaatkan organisasi tersebut untuk menggelorakan semangat mencapai kemerdekaan. Salah satunya adalah saat Ir. Soekarno melakukan kunjungan guna melihat pelaksanaan “Hidup baru Gerakan *Jawa Hokokai*” di Bogor, ia berpidato bahwa jika kita masih bermental budak maka kita tidak akan mencapai kemerdekaan walau Jepang sudah mempersilahkan kita untuk merdeka. Hal semacam ini tidak hanya terlihat dari para pimpinan Nasional pusat, tetapi dapat dilihat juga dari para pemimpin Nasional di tingkat daerah (*Shu*), baik itu dari kalangan elit sekuler maupun konvensional.<sup>51</sup>

Pada 20 Mei 1944 Bogor *Shu Hokokai* mengadakan sidang pertamanya guna meningkatkan semangat kebaktian rakyat Bogor. Pembahasan dalam sidang ini adalah cara untuk meningkatkan kebaktian rakyat dan cara agar rakyat dapat menempatkan posisinya serta dapat hidup hemat. Rakyat Bogor sudah memulai hidup hemat dari Januari 1944 atas perintah dari Bogor *Shu Keizabu Kaicho*. Dalam perintah itu meminta agar rakyat makan nasi dicampur dengan sagu kiray.<sup>52</sup>

#### **3.1.4 Jawa *Sentotai* (Benteng Perjuangan Jawa)**

Pada 10 Juni didirikan sebuah gerakan yang bernama Benteng Perjuangan Jawa. Gerakan ini didirikan berdasarkan atas jawaban sidang *Chuo Sangi-in* ke 3 kepada *Saiko Shikikan*.<sup>53</sup> Dalam usaha membentuk Benteng ini pemerintah meminta untuk mengerahkan segala sesuatu yang ada di tanah air, baik itu tenaga

---

<sup>51</sup> Wahyan. A., & Burhan M., *Op.cit*, hlm 26

<sup>52</sup> Zuhdi S., *Op.cit*, hlm 96

<sup>53</sup> *Asia Raya*, 10 Juni 2604 (1945)

manusia, hewan, alam dan lain-lain. Karena dengan semua tenaga itu bersatu maka dapat membentuk benteng terkuat.<sup>54</sup> Gerakan Benteng Perjuangan Jawa di bicarakan di Bogor *Shu Chuo Sangi Kai*. Gerakan ini adalah pembentukan atau perpaduan tenaga dari berbagai golongan dan bangsa yang ada di tanah air, baik bangsa Indonesia, bangsa Tionghoa, Peranakan, Arab, India, dan bangsa lainnya.<sup>55</sup> Dr. Marzuki Mahdi yang pada saat itu menjadi tokoh intelektual Bogor *Shu*, sekaligus kepala rumah sakit jiwa di Bogor. Dr. Marzuki Mahdi memanfaatkan orang-orang yang dirawat dengan mengeluarkan potensinya masing-masing. Orang-orang tersebut diajarkan cara membuat kerajinan tangan seperti membuat tas dan juga mereka diajarkan menenun.

Untuk mendapatkan dukungan yang lebih luas lagi, maka pemerintah Jepang melakukan kunjungan-kunjungan bersama dengan tokoh nasional seperti Ir. Soekarno dan Abikusno Tjokrosujoso serta didampingi oleh Shimizu ke Bogor. Dalam kunjungan tersebut Ir. Soekarno mengadakan rapat tertutup dengan anggota *Shu Hokokai* dan rapat terbuka dengan para penduduk di Bogor.<sup>56</sup>

Pada 8 Juli *Kyoiku Hokokai* Bogor *Shu* mengadakan permusyawaratan yang dipimpin oleh Ushiro. Dari permusyawaratan itu dihasilkan keputusan untuk menggalakan tabungan dari anggota *Kyoiku Hokokai* dan menggerakkan murid-murid sekolah guna memperkuat gerakan Benteng Perjuangan Jawa. Beberapa aksi pun dilakukan oleh pemerintah Jepang dalam memperlancar gerakan menabung di Bogor *Shu*, dari mulai mendirikan pos-pos pembantu di Leuwiliang, Cibarusah,

---

<sup>54</sup> *Ibid*

<sup>55</sup> *Ibid*

<sup>56</sup> Zuhdi S., *Op.cit*, hlm 98

Bojonglopong, Jampang Kulon, Segaranten dan Sindangbarang.<sup>57</sup> Pemerintah Jepang juga melakukan propaganda gerakan menabung, dalam rapat umum di Bogor *Shu* dikatakan bahwa tabungan sudah mencapai f 10.000. Dikatakan juga bahwa gerakan menabung usaha untuk meneguhkan Benteng Perjuangan Jawa.

Pemerintah Jepang juga terus melakukan pengurusan kekayaan di Bogor *Shu*. Selain itu di Bogor *Shu* juga diminta sumbangan-sumbangan kepada orang-orang dari seluruh lapisan masyarakat untuk membeli pesawat terbang yang akan diberikan kepada pemerintah Jepang.

### **3.1.5 *Fujinkai* (Perkumpulan Kaum Wanita)**

*Fujinkai* merupakan organisasi dibawah naungan *Jawa Sentotai* yang dibentuk oleh pemerintah Jepang guna menampung segala kegiatan kaum wanita di Indonesia. *Fujinkai* didirikan dari tingkat pusat sampai daerah, para wanita atau pegawai negeri dari tingkat pusat maupun daerah terendah harus masuk dalam *fujinkai*. Anggota *Fujinkai* harus berkewajiban mengerahkan jiwa dan tenaganya untuk kerja di tempatnya masing-masing, dan yang menjadi anggotanya adalah wanita yang berumur minimum 15 tahun.<sup>58</sup>

Para kaum wanita di Bogor *Shu* tak luput dari perhatian untuk mengikuti program pemerintah Jepang yaitu *Fujinkai*. Dari *fujinkai* di Bogor pemerintah mendapatkan tambahan dukungan tenaga. Pada 8 Juni 1944 diadakan suatu permusyawaratan yang dihadiri oleh wakil-wakil dari berbagai daerah di Bogor

---

<sup>57</sup> *Ibid*, hlm 98

<sup>58</sup> Aditia, D., Lestari, E. S., Adelia, D. N., Arif, S., & Perdana, Y. (2022). Gerakan Feminisme Fujinkai dalam Perspektif Sejarah Perjuangan Perempuan Indonesia . *Jurnal Ilmu Sejarah dan Pendidikan*, 87-97.

*Shu*, permusyawaratan ini dilakukan guna meningkatkan kegiatan *Fujinkai* di Bogor *Shu*. Hasil dari permusyawaratan yang dilakukan memutuskan penduduk harus menanam kapas, nanas seberang, sayuran, tanaman obat dan melakukan latihan *fujinkai* di setiap daerah Bogor *Shu*.<sup>59</sup>

Pada 7 Juli 1944 diadakan rapat tertutup di *Midori Figa Gekijjo* Bogor. Rapat ini juga dilaksanakan untuk menyambut berdirinya Jawa *Sentotai*. Hal-hal yang dibahas adalah tentang kewajiban kaum wanita dalam meneguhkan Jawa *Sentotai* dengan hidup berhemat, memperteguhkan kedudukan rumah tangga dan ikut serta dalam meningkatkan hasil bumi.<sup>60</sup> Pada rapat ini Ir. Soekarno juga hadir untuk mengadakan penerangan-penerangan pada penduduk Bogor *Shu*.<sup>61</sup> Penerangan yang dilakukan oleh Ir. Soekarno ialah menjelaskan tentang lingkungan kemakmuran Asai Timur Raya, membuang rasa perseorangan, berkorban dalam perang, dan kewajiban penduduk Jawa dalam memperteguh Benteng Perjuangan Jawa dan kebaktiannya.

## **3.2 Bidang Ekonomi**

### **3.2.1 Perdagangan dan Koperasi**

Pada masa pendudukan Jepang masyarakat berperan aktif dalam menjalankan perekonomian dengan berdagang. Akan tetapi dalam melakukan kegiatan berdagang itu diawasi dan diatur kebijakannya oleh pemerintah Jepang. Kemudian dalam kegiatan berdagang muncul beberapa masalah, seperti, kelangkaan barang,

---

<sup>59</sup> Zuhdi S., *Op.cit*, hlm 100

<sup>60</sup> *Ibid*

<sup>61</sup> Asia Raya, 7 Juli 2604 (1944)

tidak stabilnya harga dan adanya perdagangan gelap.<sup>62</sup> Menghadapi beberapa masalah yang muncul dalam jalannya perekonomian, maka pemerintah Jepang membuat kebijakan, *fujinkai*, mengatur masuk dan keluarnya barang. Pemerintah Bogor *Shu* pun terus melakukan pengawasan dengan ketat kepemilikan dan barang persediaan yang ada di seluruh Bogor.

Pemerintah Jepang juga membuat penetapan harga barang yang akan diperjualbelikan, serta melakukan upaya perluasan pasar perdagangan di Bogor *Shu*. Di Kota Bogor pemerintah kotapraja mengeluarkan anggaran sebesar f 2.950 (25 juta rupiah) untuk perluasan pasar di Jembatan Merah, Pasar Anyar, Pasar Empang dan lainnya.<sup>63</sup>

Pemerintah Jepang juga membentuk koperasi yang dimaksudkan untuk berperan dalam kegiatan perdagangan. Kegiatan koperasi di Bogor diawasi dan diatur oleh kantor penerangan koperasi dan perdagangan.<sup>64</sup> Kemudian koperasi-koperasi ini juga mulai didirikan di desa-desa di Kota Bogor. Hal ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian pemerintah Jepang terhadap perkembangan koperasi di berbagai wilayah. Akan tetapi, hal tersebut dimanfaatkan oleh pemerintah Jepang untuk mengeruk kekayaan rakyat dengan dalih membantu rakyat dalam menyediakan barang-barang kebutuhan sehari-hari.

Masyarakat di Kota Bogor memiliki semangat yang tinggi dalam melakukan kegiatan berkoperasi. Hal ini diperlihatkan dengan berdirinya Perusahaan Koperasi

---

<sup>62</sup> Riady, N. R., Ibrahim, N., & Martini, S. (2022). Kehidupan sosial-ekonomi masyarakat Bogor pada masa pendudukan Jepang tahun 1942-1945 . *Jurnal of Indonesian History and Education*, 487-502.

<sup>63</sup> *Ibid*, hlm 494

<sup>64</sup> Zuhdi S. *Op.cit*, hlm 49

Rakyat Indonesia (Parkindo) di Leuwiliang.<sup>65</sup> Perusahaan Koperasi Rakyat ini juga sudah mengumpulkan uang sebanyak f 4.000 atau sekitar 34 jutaan. Penghasilan yang masuk ke perusahaan koperasi ini yaitu dari usaha simpan pinjam, perdagangan hasil bumi, penggilingan padi, menyediakan kebutuhan sehari-hari, dan menyewa pasar.

Pada 23 Februari 1943 diadakan pertemuan antara pangrehpraja, kaum dagang, dan badan-badan pertanian, pertemuan ini bertujuan untuk memperluas jangkauan usaha koperasi dengan membentuk suatu badan koperasi. Hasil dari pertemuan adalah terbentuknya Koperasi Perdagangan Bangsa Indonesia (Koperbi), badan koperasi ini didirikan di 4 tempat, yaitu Kedunghalang, Semplak, Parung, dan Ciomas. Kemudian pemerintah Jepang juga ingin mncanangkan pendirian koperasi di desa-desa yang berada di Bogor *Shu*. Pendirian koperasi desa pun mulai dilaksanakan dari tanggal 2-11 Juli 1943 secara bertahap.

Saat memperlihatkan kepedulian pada perkembangan koperasi di berbagai wilayah, pemerintah Jepang memberikan bantuan modal pada koperasi. Selain itu pemerintah Jepang juga memberikan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan kepada para pegawai koperasi yang tergabung dalam pusat koperasi Pajajaran Babakan I dan yang terpilih di Kota Bogor.<sup>66</sup>

Tahun 1944 koperasi mengalami perkembangan yang cukup pesat. Hal ini dibuktikan dengan laporan sementara pada saat dilaksanakan perundingan bersama kepala-kepala ekonomi Kota dan Kabupaten Bogor, dalam laporan ini disebutkan

---

<sup>65</sup> *Ibid*, hlm 50

<sup>66</sup> *Ibid*, hlm 104

bahwa sudah 80% penduduk pribumi turut dalam koperasi desa.<sup>67</sup> Kemudian tanggal 14 Juni 1944 diadakan rapat besar Pusat Koperasi Rakyat Bogor *Shu* guna terus meningkatkan usaha koperasi. Dalam rapat ini dihasilkan sebuah rencana perekonomian baru dan perubahan nama perkumpulan menjadi Gabungan urusan barang-barang rakyat Bogor (*Bogor Shu Shomin Haikyo Rengokai*).<sup>68</sup>

Pada 28 Juni 1944 pihak pemerintah Jepang melakukan pertemuan dengan para pedagang sayuran di Bogor *Shu*. Dari pertemuan tersebut terbentuk sebuah gabungan pedagang sayuran di Bogor *Shu*. Gabungan pedagang sayuran ini dibentuk oleh pemerintah Jepang untuk mengawasi jalannya perdagangan sayuran serta untuk memperlancar pembagian barang-barang yang sesuai dengan penetapan harga pemerintah.

### **3.2.2 Hasil Pertanian**

Pada masa pendudukan Pemerintah Jepang di Indonesia, wilayah Bogor merupakan wilayah yang dianggap subur dalam memproduksi beras untuk kebutuhan Jepang dalam perang Asia Pasifik. Dalam usahanya memenangkan perang Asia Pasifik, Jepang membutuhkan persediaan logistik yang cukup. Maka dari Pemerintah Jepang harus mendapatkan persediaan logistik dari wilayah jajahannya. Beberapa kebutuhan logistik yang dibutuhkan Jepang adalah beras, kapas, rami, dan jarak.

Pemerintah Jepang mengeluarkan sebuah kebijakan ekonomi prioritas di Bogor, yaitu usaha produksi beras, kapas, tanaman jarak dan rami, komoditi inilah

---

<sup>67</sup> *Ibid*

<sup>68</sup> *Ibid*

yang menjadi kebijakan paling fundamental untuk mengeksploitasi potensi ekonomi di daerah Bogor.<sup>69</sup> Kemudian para petani di Bogor dikenakan kebijakan untuk menanam padi secara besar-besaran dan hasil panen wajib diserahkan kepada pemerintah Jepang dengan diberikan kompensasi yang rendah. Dengan adanya kebijakan ini petani Bogor berusaha dalam membangun persawahan, huma, dan ladang agar dapat meningkatkan hasil padi. Walaupun begitu pemerintah tetap ikut serta dalam meningkatkan hasil panen padi di Bogor *Shu*. Tim penyuluhan (*Zosan Shidoin*) menyediakan bibit unggul serta memberikan pengetahuan tentang cara menanam yang baik, mengusir hama, dan membuat pengairan.<sup>70</sup> Selain itu pemerintah juga mengeluarkan anggaran guna memperbesar hasil panen padi sebesar f 25.000 untuk setiap *Shu*.<sup>71</sup> Dengan anggaran ini pemerintah membuat perlombaan dan memperbanyak jumlah bibit. Pemerintah berharap dari diadakannya lomba dan penambahan bibit, petani dapat menghasilkan padi berkali lipat dari biasanya.<sup>72</sup>

Jarak yang merupakan salah satu komoditi penting yang dibutuhkan oleh pemerintah Jepang untuk kepentingan perang. Biji dari tanaman jarak mengandung zat minyak pelumas motor, dan kapal terbang, dapat digunakan juga sebagai penghalus kulit, bahan untuk campuran sabun, dan sebagai obat pencuci perut. Kemudian ditemukan hal baru dari tanaman jarak setelah dilakukan penelitian, yaitu biji jarak mengandung unsur-unsur zat yang dapat dipakai sebagai bahan

---

<sup>69</sup> Ariyanto, S., & Barkah, J. (2019). *Adaptasi Kehidupan Ekonomi Petani di Bogor 1905-1960an*. Jakarta: Unindra Press.

<sup>70</sup> Zuhdi S., *Op.cit*, hlm 102

<sup>71</sup> Asia Raya, 05 Juni 2603

<sup>72</sup> *Ibid*

membuat batu baterai.<sup>73</sup> Maka dari pemerintah Jepang membagikan benih tanaman jarak kepada petani jarak di Kota Bogor dan daerah lainnya di Indonesia.

Hasil perkebunan lain yang juga penting bagi pemerintah Jepang adalah karet. Pemerintah pun sampai mengawasi dengan ketat perihal penanam karet dengan membuat aturan bagi para petani karet harus memiliki izin dari pemerintah Jepang.<sup>74</sup> Serta pemerintah Jepang juga mengembangkan teknologi industri karet untuk mendapatkan karet istimewa seperti karet pembalut (issolatle), kawat laut (kabel) guna peperangan.<sup>75</sup> Kemudian apabila petani karet akan menjual getah karet maka harus dengan izin dari pemerintah.<sup>76</sup>

Pemerintah Jepang juga mengarahkan penduduk di Kota Bogor untuk menanam pohon kapas. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kekurangan kebutuhan pakaian. Untuk memenuhi kebutuhan kapas pemerintah Jepang menunjuk 11 *Son* (Kecamatan) di Bogor *Shu* untuk melakukan penanaman besar-besaran pohon kapas. 11 Kecamatan ini akan diberikan bibit kapas sebesar 100 kg per Kecamatan.<sup>77</sup>

### **3.3 Bidang Sosial**

#### **3.3.1 Pendidikan**

Pada masa awal pendudukan Jepang sekolah-sekolah yang didirikan oleh Belanda, seperti: *Europeese Lagere School* (ELS), *Hollandse Islandse School* (HIS) dan *Schakel School* ditutup selama masa pendudukan Jepang, karena pemerintah

---

<sup>73</sup> Zuhdi S., *Op.cit*, hlm 58

<sup>74</sup> *Ibid*

<sup>75</sup> Asia Raya, 10 Juni 2604

<sup>76</sup> Riady, N. R., Ibrahim, N., & Martini, S., *Op.cit*, hlm 493

<sup>77</sup> Zuhdi S., *Op.cit*, hlm 104

Jepang ingin menghilangkan pengaruh Hindia Belanda yang diterapkan di sekolah-sekolah tersebut. Akan tetapi perlahan pemerintah Jepang membuka kembali sekolah. Pada 26 Maret 1942 di Bogor *Shu* sekolah mulai dibuka kembali, dari mulai sekolah tingkat rendah, MULO (Meer Uitgebreid Lager Onderwijs) atau sekolah menengah pertama, sekolah pertanian dan sekolah-sekolah lainnya. Akan tetapi pembukaan sekolah-sekolah di Bogor *Shu* tidak dilakukan secara serentak oleh pemerintah. Dengan membuka sekolah-sekolah pemerintah Jepang ingin menjadikan pendidikan sebagai alat untuk membangkitkan potensi masyarakat di Indonesia.<sup>78</sup>

Pada 16 Juli 1942 diadakan pertemuan di Kantor Pengajaran Bogor, pertemuan ini diadakan untuk membahas perbaikan dunia pendidikan di Bogor *Shu*.<sup>79</sup> Dalam pertemuan ini pemerintah menjelaskan tentang tujuan pendidikan dan pengajaran. Tujuan pendidikan dan pengajaran pemerintah Jepang ialah untuk mencerdaskan rakyat yang menjadi pokok dasar, serta sistem dan kurikulum yang dipakai ditujukan untuk keperluan perang.

Pada April 1943 yang bertepatan dengan tahun ajaran baru, sekolah-sekolah di Bogor *Shu* mulai berjalan kembali. Pemerintah Jepang yang melihat potensi di Bogor *Shu* pada bidang pertanian menekankan untuk membuka sekolah pelatihan pertanian, karena dengan dibukanya sekolah pertanian maka lulusannya nanti akan dapat membantu ekonomi perang. Sekolah pelatihan tani di Bogor diadakan di daerah Sukasari. Pada 1 Januari 1943 pemerintah militer mengadakan

---

<sup>78</sup> Nagazumi, A. (1988). *Pemberontakan Indonesia di Masa Pendudukan Jepang*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Hlm 12

<sup>79</sup> *Ibid*, hlm 65

permusyawaratan di Jakarta yang dihadiri oleh H. Okuhara sebagai kepala pertanian dan para kepala sekolah tani Bogor (Sodo), Sukabumi (Gunawan) dan Malang (Wirasumantri).<sup>80</sup>

Para murid yang berminat untuk masuk sekolah tani dipersilahkan untuk mendaftar pada bulan April saat tahun ajaran baru nanti. Untuk sekolah tani di Bogor menerima siswa yang duduk di kelas 1 sampai 3, serta memberikan fasilitas kepada muridnya yaitu pondok gratis sementara.<sup>81</sup> Sekolah tani di Bogor mengalami kemajuan, hal ini dibuktikan dengan lulusnya 27 peserta didik dan diberi ijazah pada 3 Maret 1943. Setelah diberi ijazah para murid langsung diterjunkan ke lapangan, ada yang ditempatkan di kantor pertanian (*Nomuka*), perkebunan, perikanan perusahaan gula, bagian tanaman kapas dan ada yang di pulau Bangka.<sup>82</sup>

Bersamaan dengan dibukanya sekolah tani, di Bogor juga dibuka sekolah Dokter Hewan di Kedunghalang, para murid yang berminat bisa mendaftar. Akan tetapi sekolah Dokter Hewan hanya akan menerima 40 murid dari 400 murid yang mendaftar. Pada bulan Maret 1943 sekolah Dokter Hewan sudah berhasil meluluskan 5 orang muridnya.

Akan tetapi, pada saat terjadi pertumbuhan dalam bidang pendidikan ini muncul satu masalah, yaitu buta huruf di kalangan masyarakat. di Kota Bogor

---

<sup>80</sup> *Ibid*, hlm 67

<sup>81</sup> Asia Raya, 16 Juli 2602

<sup>82</sup> Zuhdi S. *Op.cit*, hlm 68

tercatat 42.000 orang yang buta huruf.<sup>83</sup> Untuk menyelesaikan masalah ini pemerintah mengadakan Pemberantasan Buta Huruf (PBH) di 16 tempat di Bogor.

Selain pembelajaran di atas pemerintah juga menganggap bahwa pembelajaran bahasa Jepang penting untuk diberikan kepada masyarakat Indonesia. Akan tetapi tenaga pendidik untuk melakukan kelas bahasa Jepang masih sukar didapat. Pemerintah Jepang pun membuat kebijakan dengan melakukan penataran dan setelah lulus para murid diperbolehkan langsung mengajar.<sup>84</sup> Ada 63 orang yang mengikuti penataran bahasa Jepang, orang-orang ini terdiri dari pegawai negeri dan juga para pemuda yang terpilih dari setiap *Shu* di Jawa.<sup>85</sup> Tujuan dan maksud dilaksanakannya penataran guru bahasa Jepang, karena balatentara Jepang membutuhkan guru bahasa untuk menjadi pelopor guna kepentingan berbagai pekerjaan negeri dan juga untuk melaksanakan persatuan antara bangsa Jepang dan Indonesia.<sup>86</sup>

Dunia pendidikan yang dibangun pemerintah Jepang juga merupakan bagian untuk memberikan dukungan kepada Jepang dalam perang. Di Bogor *Shu* sampai menganjurkan kepada para murid sekolahnya untuk bertukar surat dengan para prajurit Jepang di medan perang, hal ini dilakukan untuk memepererat batin antara para murid sekolah dengan para prajurit.<sup>87</sup> Selain itu, sekolah-sekolah tani juga harus memiliki kebun yang dapat ditanami tanaman jarak, kacang tanah, kedelai, dan tanaman penting lainnya. Program ini dilaksanakan agar para murid dapat

---

<sup>83</sup> *Ibid*, hlm

<sup>84</sup> *Ibid*, hlm 111

<sup>85</sup> Asia Raya, 1 Juni 2604

<sup>86</sup> *Ibid*

<sup>87</sup> Zuhdi S. *Op.cit*, hlm 112

langsung mempraktekan teori yang dipelajari, serta untuk membantu memperkuat ekonomi perang Jepang.

### 3.3.2 Romusha

Romusha merupakan sebuah upaya pemerintah Jepang dalam mengeksploitasi tenaga manusia di Indonesia, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan penunjang perang di Asia Timur Raya. Pada sidang *Chuo Sangi-in* ke 4 dibahas juga tentang meningkatkan tenaga pekerja, dalam sidang diusulkan beberapa syarat untuk dibentuk badan-badan yang dapat memotivasi rakyat menjadi tenaga sukarela di perusahaan-perusahaan balatentara Jepang, melalui kerjasama dengan bupati, camat, wedana, dan kepala desa.<sup>88</sup>

Keadaan perang yang semakin panas dan sudah mendekati dalam penentuan menang atau kalah. Dalam sidang *Chuo Sangi in* ke 4 terus disampaikan bahwa kita harus mengeluarkan segenap tenaga kita untuk dapat menghancurkan dan meruntuhkan musuh, hal ini dilakukan untuk mencapai kemenangan dan membangun lingkungan kemakmuran bersama di Asia Timur Raya.<sup>89</sup> Dalam keadaan perang saat ini balatentara Jepang membutuhkan bantuan tenaga kerja atau buruh dalam memperkuat pembangunan, dengan diperbanyaknya buruh maka akan meningkat hasil dari perusahaan-perusahaan balatentara Jepang yang dapat menunjang perang di Asia Timur Raya.<sup>90</sup> Memperbanyak tenaga kerja atau buruh juga dilakukan untuk menambah barang makanan.<sup>91</sup>

---

<sup>88</sup> Poesponegoro. M. D. & Notosusanto N. *Op.cit*, hlm 61

<sup>89</sup> Asia Raya, 12 Agustus 2604

<sup>90</sup> *Ibid*

<sup>91</sup> *Ibid*

Di Bogor *Shu* juga meningkatkan pengerahan tenaga kerja atau buruh (*Romusha*). Hal ini dilakukan setelah rapat umum Bogor *Shu Sangi Kai* pada 27 Agustus 1944 di *Mi Dori Gekijo* Bogor.<sup>92</sup> Dalam rapat ini Dr. Marzuki Mahdi menyampaikan hasil sidang *Chuo Sangi in* ke 4 yaitu tentang pengerahan tenaga kerja (*Romusha*) untuk bekerja di segala bagian lapangan, baik itu dari kalangan tua dan muda serta perempuan dan laki-laki. Maka dari itu pemerintah Bogor *Shu* memberikan perintah kepada para *Kencho* (Bupati) sampai *Kucho* (Kepala Desa) untuk meningkatkan jumlah tenaga kerja atau buruh.<sup>93</sup> Dengan adanya perintah para pemimpin dari tingkat *Kencho* sampai dengan *Kucho* mencari dan mengumpulkan tenaga kerja khususnya para pemuda yang menjadi incaran untuk dapat memenuhi kebutuhan tenaga kerja untuk dikirimkan ke lapangan.

### **3.4 Bidang Militer**

#### **3.4.1 Seinendan**

*Seinendan* merupakan sebuah wadah yang didirikan oleh pemerintah guna mengumpulkan dan menyatukan para pemuda yang nantinya dapat menjadi barisan tentara cadangan perang bagi Jepang. Pembentukan *Seinendan* di Bogor *Shu* ialah dengan mengumpulkan para pemuda yang berusia 14-25 tahun. Kemudian para barisan pemuda di Bogor dikumpulkan dan disatukan dalam Bogor *Shi Seinendan*.<sup>94</sup> Dengan disatukannya para barisan pemuda dalam Bogor *Shi Seinendan* maka akan dapat memudahkan dalam melatih para pemuda ini berdasarkan satu tujuan,

---

<sup>92</sup> Zuhdi S., *Op.cit*, hlm 107

<sup>93</sup> *Ibid*

<sup>94</sup> Asia Raya, 23 April 2603

rancangan, dan pimpinan.<sup>95</sup> Pada 20 april 1943 digedung Haminte Bogor dilakukan sebuah pertemuan yang dipimpin oleh Bogor *Shicho* untuk membahas tentang berdiri Bogor *Shi Seinendan*.<sup>96</sup> Kemudian pada 26 April 1943 Bogor *Shi Seinendan* yang dipimpin oleh Bogor *Shicho* dilantik dan diresmikan oleh Bogor *Shucokan*.<sup>97</sup>

Pada 12 Februari 1944 mulailah Latihan bagi para *Seinendan*, latihan *Seinendan* di Bogor *Shi* dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu kelompok utara (*Kita Chutai*), kelompok selatan (*Minami Chutai*), kelompok timur (*Higashi Chutai*), dan kelompok barat (*Nishi Chutai*).<sup>98</sup> Pimpinan dari tiap *Chutai* adalah seorang *Chutaicho* dan dalam setiap kelompok ini terdiri dari 150 prajurit yang akan latih. Pelatihan yang diberikan tentang keprajuritan, semangat bekerja sukarela dan disiplin.<sup>99</sup>

### 3.4.1 PETA

Pembentukan Pembela Tanah Air (PETA) terjadi pada bulan Oktober 1943, pendirian PETA merupakan salah satu usaha pemerintah Jepang untuk mencapai kemenangan di Asia Timur Raya.<sup>100</sup> Balatentara Jepang juga memiliki harapan besar kepada para sukarela yang akan bergabung ke PETA.<sup>101</sup> Sebelum terbentuk PETA, pada bulan Juni 1943 telah dilakukan terlebih dahulu latihan bagi calon-calon perwira PETA. Kapten Marzuki sebagai pimpinan dari *Beppan* juga

---

<sup>95</sup> *Ibid*

<sup>96</sup> Asia Raya, 24 April 2603

<sup>97</sup> Zuhdi S., *Op.cit*, hlm 73

<sup>98</sup> *Ibid*, hlm 114-115

<sup>99</sup> *Ibid*, hlm 115

<sup>100</sup> Asia Raya, 4 Oktober 2603

<sup>101</sup> *Ibid*

mendirikan pusat latihan bagi perwira-perwira PETA.<sup>102</sup> Para calon perwira yang telah terpilih kemudian dikumpulkan di sebuah ksatrian yang berada di jalan Jenderal Sudirman, Bogor.

Pelatihan para calon perwira ini dibagi menjadi 4 kelompok yang masing-masing kelompoknya dipimpin oleh perwira dari Jepang, yaitu:<sup>103</sup>

1. kelompok istimewa (para *Daidancho* atau komandan battalion) yang dipimpin oleh Letnan Satu Ito Sei-ichi
2. kelompok pertama (para *Chudancho* atau komandan kompi) yang dipimpin oleh Letnan Satu Nomura Shohichi
3. kelompok kedua (para *Shudanchoi* atau Komandan Peleton) yang dipimpin oleh Letnan Satu Yanagawa Motoshige
4. kelompok ketiga (para *Idem Jawa Tengah dan Timur*) yang dipimpin oleh Letnan Satu Tsuchiya Kiso dan Letnan Satu Rokukawa Masami.

Abdullah bin Nuh dan H. Basjuni menjadi angkatan pertama latihan tersebut yang berasal dari Bogor *Shu*, serta menghasilkan 66 batalion (*Daidan*) di Jawa.<sup>104</sup> Setelah latihan angkatan pertama tiap-tiap battalion di seluruh *Shu* di Jawa diberikan sebuah panji-panji PETA oleh *Saiko Shikikan* yang dilakukan pada 9 Februari 1944.<sup>105</sup> Diadakan juga upacara penghormatan panji-panji tersebut yang dihadiri oleh Bogor *Shucokan*, *Shicho*, *Kecho*, *Fujinkai*, dan lain-lain. Dalam upacara ini Abdullah bin Nuh menyampaikan bahwa panji-panji adalah lambang persatuan dan keadilan di antara prajurit.

Setelah dibentuknya tentara PETA ini para anggota prajurit biasa maupun opsir-opsir terus melatih jiwa dan raganya yang dipimpin oleh Balatentara

---

<sup>102</sup> *Beppan* adalah suatu instansi seksi khusus dari bagian intelejen yang ditugaskan untuk membentuk dan melatih tentara PETA., Zuhdi S. *Op.cit*, hlm 76

<sup>103</sup> *Ibid*, hlm 77

<sup>104</sup> *Ibid*,

<sup>105</sup> *Ibid*, hlm 117

Jepang.<sup>106</sup> Dengan membawa panji-panji sebagai lambang persatuan, para tentara PETA berani maju untuk membela tanah yang mereka tempati. Hal ini menunjukkan bahwa para tentara PETA memiliki keteguhan dalam melawan ancaman dari musuh dengan dipimpin Balatentara Jepang.<sup>107</sup>

Kedadaan perang di Asia Timur Raya yang semakin sengit dan panas membuat Pemerintah Jepang membentuk tentara PETA yang kedua. Dalam pembentukan Tentara PETA kedua pemerintah Jepang berharap kepada para pemuda yang ada di seluruh Indonesia untuk menyerahkan jiwa dan raga dalam membela tanah air.<sup>108</sup> Setelah diadakannya latihan tentara PETA yang kedua pembelaan di tanah Jawa semakin kuat, karena para perwira PETA angkatan dua telah diresmikan pada 10 Agustus 1944. Sebelum dilaksanakannya peresmian para perwira, diadakan sebuah upacara penghormatan kepada para *bundancho* di ruang pertunjukan *Nokyoin* Bogor.<sup>109</sup> Di Bogor *Shu* semangat para tentara PETA yang sedang berkobar senantiasa dipelihara, serta kesadaran tentang tujuan PETA terus diperdalam.<sup>110</sup>

### 3.4.1 Barisan Pelopor

Barisan pelopor terbentuk pada bulan September 1944. Barisan pelopor dibentuk untuk menjadi tulang sumsum dari Benteng Perjuangan Jawa, dan memperkuat kemauan perang, serta menyebarkan kegiatan kebaktian secara luas.<sup>111</sup> Barisan pelopor ini diketuai oleh Soekarno dan didampingi oleh para wakilnya

---

<sup>106</sup> Sinar Baroe, 4 April 1944

<sup>107</sup> *Ibid*

<sup>108</sup> *Ibid*

<sup>109</sup> Zuhdi S., *Loc.it*

<sup>110</sup> Asia Raya, 17 April 2604

<sup>111</sup> Asia Raya, 15 Agustus 2604

yaitu R. P. Soeroan, Oto Iskandar Dinata, dan Boentaran Martoatmojdo.<sup>112</sup> Kemudian para wakil ini diperintahkan untuk pergi ke setiap daerah di Jawa untuk menunjuk calon-calon ketua Barisan pelopor daerah.

Di Bogor *Shu* yang menjadi pemimpin Barisan pelopornya adalah Gatot Mangkupradja dan wakilnya Soeradiradja.<sup>113</sup> Kemudian pemimpin Barisan pelopor Bogor *Shu* menunjuk M. Darmin sebagai *Daitaicho* dan Abdoellah sebagai *Fuku Daitaicho* untuk mengurus Barisan pelopor daerah Bogor *Shi*.<sup>114</sup> Diadakan sebuah pertemuan di Bogor *Shu* untuk membahas tentang cara memunculkan api semangat penduduk di Bogor *Shu* dalam melawan musuh. Kemudian dari pertemuan tersebut muncul sebuah rencana untuk melakukan penerangan kepada penduduk Bogor *Shu*.

---

<sup>112</sup> *Ibid*

<sup>113</sup> *Ibid*

<sup>114</sup> Asia Raya, 7 Oktober 2604